



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4751-4758

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

M. Iqbal Anugerah Berutu^{1✉}, Cris Kuntadi²

(1) Program Studi Magister Akuntansi, Perbanas Institute

(2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: m.iqbal02@perbanas.id^{1✉}

Abstrak

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset relevan yang berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah (Y) sebagai variabel dependen terhadap: Jumlah Penduduk (X1), Tingkat Inflasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3). Adapun tujuan penulisan artikel ini sebagai hipotesis yang membangun pengaruh antar variabel agar dapat digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel berupa literatur review ini adalah: 1) Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah; 2) Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah; dan 3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Keyword: *Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

Previous research or relevant research is very important in a research or scientific article. Previous research or relevant research that serves to strengthen the theory and phenomenon of the relationship or influence between variables. This article reviews the factors that influence local taxes (Y) as the dependent variable on: population (X1), inflation rate (X2) and economic growth (X3). The purpose of writing this article is as a hypothesis that builds influence between variables so that it can be used in further research. The results of this article in the form of a literature review are: 1) Total population has a positive effect on regional tax revenues; 2) The inflation rate has a positive effect on local tax revenues; and 3) Economic growth has a positive effect on regional tax revenues.

Keyword: *Local Taxes, Total Population, Inflation Rate and Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara adalah salah satu sumber penerimaan yang tertuang di dalam postur APBN yang berasal dari penerimaan perpajakan. Pada UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain bersifat memaksa demi keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan undang-undang untuk membayar sejumlah uang untuk kas negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (Resmi, 2016).

Pembenahan terkait administrasi sistem perpajakan, perubahan regulasi dan peningkatan data basis perpajakan disebut sebagai reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri mempunyai peran penting, diantaranya perubahan/pembaharuan sistem yang dianut pada setiap tahunnya. Adanya reformasi sistem perpajakan diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan yang keluarannya dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Berikut tabel 1, untuk menggambarkan Kondisi Perpajakan di Indonesia

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2021-2023
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2021	1.547.841	-
2022	1.924.937,5	0,19
2023	2.016.923	0,04

Sumber: Badan Pusat Stastitika, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,91 % dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,04 %. Pertumbuhan penerimaan Pajak Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dimana terjadi kenaikan pajak sebesar 0,19 % dalam tiga tahun terakhir.

Sebagaimana didefinisikan dalam Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai uang dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dihasilkan oleh masyarakat setempat atas pungutan berdasarkan peraturan daerah. Nantinya Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat membiayai kebutuhan daerah demi kemakmuran masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, namun saat ini tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang mencukup untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh potensi daerah yang berbeda-beda. Pada tabel 2 di bawah dapat dilihat perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu 3 tahun di 33 Provinsi di Indonesia.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2021-2023

(dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2019	64.822.598.306	-
2020	54.105.231.830	-19,8
2021	67.443.015.393	19,7

Sumber : Badan Pusat Stastitika, 2023 (diolah)

Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia pada tabel 2 mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2020 mengalami penurunan 19, 8 % namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan 19,7 %. Wabah Pandemi Covid-19 dapat menjadi salah satu pemicu utama penurunan penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2020 (Berutu & Erasashanti, 2023).

Besar kecilnya penerimaan di sektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikaitkan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, penerimaan sektor pajak juga dipengaruhi oleh inflasi (Lumy et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian terhadap jumlah penduduk, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pajak Daerah, Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, *Scholar Google* dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah

Dalam teori yang dikemukakan oleh Musgrave yang menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah masyarakat, maka dikatakan jika jumlah masyarakat mempengaruhi kepada pendapatan pajak daerah. Pada saat jumlah masyarakat bertambah, sehingga permintaan akan barang publik akan semakin banyak maka pemerintah akan tetap memaksimalkan untuk memberikan barang- barang publik itu namun dengan jasa timbal balik dari warga yang berbentuk pemungutan pajak yang bersifat memaksa.

Teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh (Lumy et al., 2018), (Widyastuti & Andriani, 2021) dan (Yasser & Widajantie, 2022) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pajak Daerah

Menurut teori inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi.

Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Para

penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

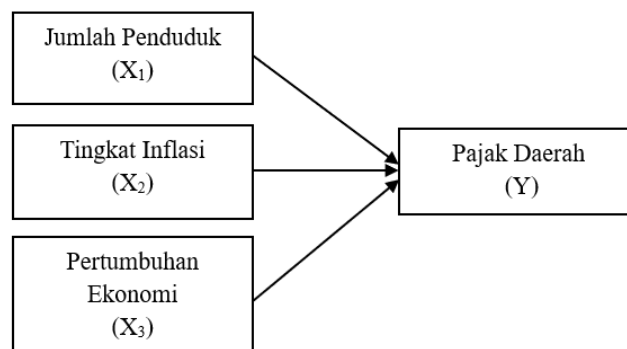
Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh (Lumy et al., 2018), (Aji & Sbm, 2021), (Simbolon & Herijawati, 2023) dan (Amaludin & Romadhina, 2023) yang menyatakan bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah

Peningkatan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* karena pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat selalu berupaya untuk melakukan peninjauan pada setiap provinsi yang ada di indinoseia untuk melihat potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah supaya pemerintah bisa mendukung potensi tersebut salah satunya dengan mealukan Pembangunan infrastruktur yang merata agar ekonomi di setiap provinsi bisa terus meningkat setiap tahunnya karena dengan peningkatan tersebut bisa menambah pendapatan negara terutama pada penerimaan pajak daerah.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh (Amaludin & Romadhina, 2023) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pajak Daerah. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Pajak Daerah, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) : (Lumy et al., 2018)(Aji & Sbm, 2021)(Akbar, 2022)(Widyastuti & Andriani, 2021)
- b) Jumlah Industri : (Aji & Sbm, 2021)(Widyastuti & Andriani, 2021)
- c) Pendapatan per kapita : (Simbolon & Herijawati, 2023)
- d) Investasi : (Akbar, 2022)
- e) Kunjungan Wisatawan : (Krisnayanthi & Karmini, 2019)
- f) Jumlah Pengunjungan : (Ririhena et al., 2021)
- g) Tingkat Hunian Kamar Hotel : (Ririhena et al., 2021)
- h)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari teori dan artikel yang relevan, maka diperoleh dan dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif dengan penerimaan pajak daerah artinya semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari Pajak Daerah.
2. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah. Apabila tingkat inflasi meningkat akan menyebabkan penerimaan Pajak Daerah juga mengalami peningkatan.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pajak Daerah. Hal ini sejalan jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sehingga masyarakat akan merasa puas dan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan untuk membayar pajak dan hal tersebut akan menambah penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Pajak Daerah, selain dari Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Pajak Daerah selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri, Pendapatan per kapita, Investasi, Kunjungan Wisatawan, Jumlah Pengunjungan dan Tingkat Hunian Kamar Hotel

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. B., & Sbm, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1–12
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). *Deeppublish: Yogyakarta*
- Akbar, D. B. M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(12), 1281–1294.
- Amaludin, T. B. A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 123–137.
- Berutu, M. I. A., & Erasashanti, A. P. (2023). Analysis of the Influence of Local Tax Revenue, Regional Retribution and Results of Separate Regional Wealth Management on Regional Original Revenue (PAD) of North Sumatra Regency/City. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 1(2), 201–212.
<https://doi.org/10.55927/ijems.v1i2.3820>
- Krisnayanthi, P. A., & Karmini, N. L. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9(8), 1861–1887.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 278–289.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Akuntansi Dan Pembangunan*, 19(2), 1–16.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Ririhena, S. A., Maspaitella, M. R., & Yap, R. A. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Manokwari Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 511–525. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18150>
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Rubinstein : Jurnal Multidisiplin Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein: Jurnal Multidisiplin*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widyastuti, R. D., & Andriani, F. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Pontianak memerlukan biaya relatif besar . Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)*.

Yasser, H., & Widajantie, D. T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.